

STRATEGI *BALANCE OF POWER* INDONESIA DALAM “PERANG DINGIN” ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN

Siti Sarah¹, Widodo², Yusnaldi³

Abstrak: Kawasan Laut China Selatan dikenal sebagai jalur laut tersibuk kedua di dunia setelah Terusan Suez di Mesir, kawasan ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang berlimpah serta mempunyai cadangan minyak dan gas alam yang besar. Karena potensinya, kawasan tersebut sampai saat ini masih menjadi perebutan *claim* antara beberapa negara. Saat ini diketahui bahwa Amerika Serikat dan China menjadi negara hegemoni terbesar dalam bidang ekonomi yang memperebutkan kekuasaan di wilayah Laut China Selatan. Beberapa pakar bahkan mendiskusikan adanya kemungkinan persaingan yang akan diakhiri dengan perang atau konflik militer di abad 21. Indonesia bukan termasuk negara *claimant* di wilayah Laut China Selatan, namun memiliki kedaulatan di dekat wilayah tersebut.. Jika terjadi konflik antara AS dan China pada kawasan Laut China Selatan, tentunya akan berimplikasi langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia di Natuna dan sekitarnya. Untuk menghadapi skenario tersebut, Indonesia harus mempersiapkan kekuatan pertahanannya. Indonesia berfokus pada strategi *balance of power* dengan negara lain yang juga tidak menginginkan adanya konflik atau perang dan juga berusaha untuk menyeimbangkan kekuatannya dengan negara China maupun AS.

Kata Kunci: *Balance of Power, Perang dingin, Laut China Selatan.*

¹ Siti Sarah, Mahasiswa Prodi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, sitisarah0201@gmail.com.

² Laksdya TNI (Purn) Dr. Widodo, S.E., M.Sc. Dosen Tetap Prodi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, widodounhan2017@gmail.com.

³ Kolonel Laut (KH) Dr. Yusnaldi, S.H., S.E., S.Ag., M.Pd, M.M., Dosen Tetap Prodi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, yusnaldy@yahoo.com.

1. PENDAHULUAN

Wilayah Laut China Selatan (LCS) merupakan jalur laut yang sangat strategis untuk bidang perekonomian khususnya sebagai jalur perdagangan atau pelayaran internasional. Selain sebagai jalur laut tersibuk kedua di dunia, kawasan laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang berlimpah serta mempunyai cadangan minyak dan gas alam yang besar. Karena potensinya, kawasan Laut China Selatan sampai saat ini masih menjadi perebutan *claim* antara beberapa negara di Asia Tenggara yang memiliki zona laut berdekatan dengan kawasan tersebut. Selain negara-negara di Asia Tenggara, Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara yang ikut andil dalam memanasnya ketegangan di kawasan Laut China Selatan.

Saat ini diketahui bahwa Amerika Serikat dan China menjadi negara hegemoni terbesar dalam bidang ekonomi yang memperebutkan kekuasaan di wilayah Laut China Selatan. Beberapa pakar bahkan mendiskusikan adanya kemungkinan persaingan yang akan diakhiri dengan perang atau konflik militer di abad 21⁴. Amerika Serikat (AS) mengubah fokus kebijakan luar negerinya dari berfokus ke wilayah Timur Tengah menjadi kawasan Asia Pasifik. Strategi *rebalancing* ini diprediksi akan menimbulkan resiko terhadap hubungan, baik kerjasama atau kesepakatan antar negara-negara di Asia-Pasifik, salah satunya dengan munculnya persepsi ancaman dari negara lain. Muncul tanggapan pro dan kontra mengikuti penetapan strategi *rebalancing* AS, karena kemungkinan yang muncul hanya dua opsi, yaitu antara menguntungkan atau merugikan negara di Kawasan Asia-Pasifik. Beberapa pihak mengambil kesimpulan bahwa kedatangan AS ke Kawasan Asia-Pasifik ini dipicu oleh meningkatnya kapabilitas China yang menjadi negara dengan kekuatan besar di kawasan Asia baik dalam bidang ekonomi, diplomasi, maupun militernya.

China saat ini bangkit menjadi kekuatan baru di wilayah Asia Pasifik. Selain itu China

menunjukkan karakteristik hegemoninya dalam sengketa Laut China Selatan. Karakteristik hegemoni yang selalu berusaha meningkatkan kekuatannya untuk menekan negara lain ditunjukkan dengan terus meningkatkan anggaran militer, memodernisasi peralatan militer, terutama angkatan laut, serta melakukan reklamasi, diantaranya untuk membuat landasan pesawat dan pembangunan yang dicurigai instalasi militer di pulau-pulau yang dikuasai, baik di Kepulauan Paracel maupun Kepulauan Spratly⁵.

Akibat dari ketegangan ini, negara-negara lain di Asia Tenggara yang pada umumnya bukan negara adidaya akhirnya menempatkan dirinya pada beberapa opsi. Pertama yaitu bersekutu dengan China agar tidak menjadi musuh. Kedua yaitu bersekutu dengan Amerika agar mendapat bantuan melawan china dalam mengklaim wilayahnya di Laut China selatan. Opsi terakhir yaitu meningkatkan kekuatan negara dengan cara membuat satu ikatan bersama atau aliansi untuk upaya menyeimbangi China maupun Amerika Serikat. Terlepas dari beberapa opsi di atas, saat ini jelas berlangsung ketegangan pada aspek keamanan dan pertahanan di kawasan Laut China Selatan karena khawatir terjadinya konflik antara dua Negara besar. Masalahnya adalah pada negara-negara di Asia Tenggara. Karena pilihan manapun yang diambilnya akan mempengaruhi negaranya secara internal maupun eksternal. Secara internal akan mempengaruhi militer negara yaitu pertahanan di wilayah laut perbatasan dan secara external akan mempengaruhi kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya.

Indonesia bukan termasuk negara pengklaim di wilayah Laut China Selatan, namun Indonesia juga memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Salah satunya yaitu kepentingan ekonomi khususnya pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut Natuna dan sekitarnya. Jika terjadi konflik antara Amerika Serikat dan China pada kawasan Laut China

⁴ Hendra Maujana Saragih, "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan", (Jakarta: Universitas Nasional, 2018), hlm 2.

⁵ SIPRI. "Recent Trends in Military Expenditure," 2015, http://www.sipri.org/research/armaments/milex/research/armaments/milex/research/armaments/milex/milex_database diakses pada 21 November 2021.

Selatan, tentunya akan berimplikasi langsung terhadap kedaulatan Indonesia. Untuk menghadapi skenario tersebut, Indonesia tentunya harus sudah memiliki kesiapan kekuatan dalam bidang pertahanan guna mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi tersebut. Selama ini Indonesia diketahui sebagai negara yang menghindari terjadinya konflik, sehingga tidak memihak pada negara manapun. Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai non-claimant states saat terjadi persengketaan di Laut China selatan. Indonesia juga tidak mengikuti jejak negara-negara lain yang mulai mengembangkan nuklir pada saat ketegangan sengketa ini terjadi, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Selain dengan memperkuat strategi pertahanan maritimnya, Indonesia berfokus pada strategi *balance of power* dengan negara-negara lain yang juga tidak menginginkan adanya konflik/perang dan juga untuk menyeimbangi kekuatannya dengan negara China maupun Amerika Serikat.

Artikel ini akan memiliki 3 bagian diskusi pembahasan. Pertama akan membahas mengenai ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan China di kawasan Laut China Selatan. Kedua membahas Indonesia dalam pusaran konflik Laut China Selatan. Terakhir akan membahas bagaimana strategi *Balance of Power* Indonesia dalam menghadapi konflik atau perang yang mungkin terjadi.

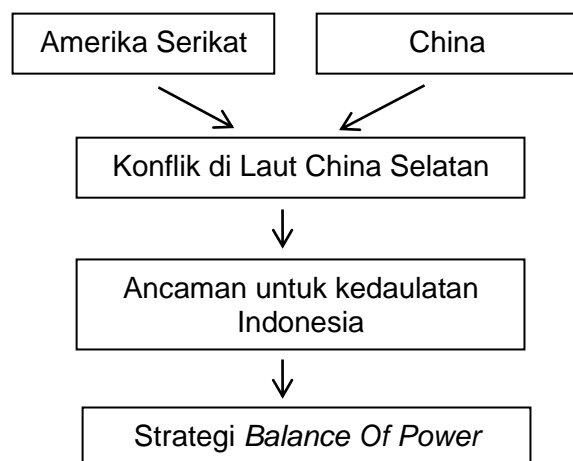
2. ISI PENELITIAN

2.1. Kerangka Pemikiran

Konflik dapat dilihat dari berbagai perspektif, dengan melihat latar belakang, aktor yang terlibat dan kepentingannya, serta intensitas dan keluasan wilayah konflik. Dari latar belakangnya, konflik Laut China Selatan dapat dilihat dari klaim historis kepenguasaan wilayah di masa lalu oleh penguasa-penguasa tradisional yang berujung pada klaim pemilikan oleh penguasa selanjutnya dari wilayah kerajaan atau negara yang sama. Sedangkan dari aktor yang terlibat dan kepentingan yang menyertainya, beberapa negara di kawasan, baik yang merupakan anggota ASEAN maupun bukan, serta negara di luar kawasan adalah pemangku kepentingannya. Sementara, dilihat dari

intensitasnya, konflik Laut China Selatan selama ini dapat dikategorikan sebagai konflik berskala rendah. Namun, dalam perkembangan di masa depan, jika tidak dapat dikelola dan dicari solusi yang efektif, konflik tersebut dapat semakin terbuka sifatnya dan berkembang luas menjadi suatu konflik bersenjata antar-negara di kawasan (*regional conflict*)⁶.

Indonesia bukan termasuk negara pengklaim di wilayah Laut China Selatan, namun Indonesia juga memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Jika terjadi konflik antara Amerika Serikat dan China, tentunya akan berimplikasi langsung terhadap kedaulatan Indonesia. Maka dari itu untuk menyeimbangi kekuatan dua negara tersebut, Indonesia menerapkan *balance of power* strategi. Teori *balance of power* merupakan teori yang dicetuskan oleh Stephen M. Walt menjelaskan bahwa aliansi secara umum dilihat sebagai respon negara terhadap suatu ancaman. Respon yang ditimbulkan negara memunculkan dua kemungkinan formasi aliansi yang akan dipilih oleh negara, yaitu melakukan penyeimbangan (*balancing*) atau *bandwagoning*⁷. Seringkali *balance of power* akan terjadi apabila adanya bipolarisme yang terbentuk, Seperti pada saat perang dingin terjadi.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

⁶ Rizki Roza, *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013), hlm. xii-xiii

⁷ Claritha Cendrawati Warembai, *"Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Masalah Nuklir Korea Utara"*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014), hlm. 3.

3. ISI PENELITIAN

3.1. Ketegangan Antara Amerika Serikat Dan China Di Laut China Selatan

Laut China Selatan telah lama menjadi arena pertarungan politik regional maupun internasional. Potensi Laut China Selatan menyebabkan adanya keadaan asimetri dan ketegangan dalam perselisihan kedaulatan wilayah dan yurisdiksi maritim. Hal itu juga menarik AS untuk berusaha terlibat di wilayah Laut China Selatan. Rivalitas antara AS dan China di Laut China Selatan juga memiliki kepentingan masing-masing yang ingin dicapai. Melalui aksi China selama empat dekade terakhir, diketahui bahwa China mengejar setidaknya tiga kepentingan. Pertama, tujuan China adalah adanya integrasi regional dengan negara-negara Asia Tenggara. Investasi China merupakan strategi untuk mengimbangi kekuatan AS dan membekukan ketegangan antara China dan negara-negara Asia Tenggara atas klaim Laut China Selatan. Kedua, China ingin memastikan kontrolnya atas sumber daya di Laut China Selatan. Minyak, gas, dan stok ikan menjadi hal penting bagi China untuk memastikan kontrol sumber daya di Laut China Selatan. Ketiga, China ingin meningkatkan kontrol atas Laut China Selatan untuk menciptakan zona penyangga keamanan maritim yang melindungi wilayah vital China⁸.

Pada lensa yang berbeda, AS juga diketahui memiliki kepentingan signifikan dalam politik, keamanan, dan ekonomi yang ingin dicapai di Laut China Selatan. Pertama, dalam aturan dan norma global, AS memiliki kepentingan pada penyelesaian damai perselisihan Laut China Selatan berdasarkan hukum internasional. Pembeneran China atas klaim Laut China Selatan berdasarkan pada *nine-dash line* merupakan kegagalan penegakan hukum internasional yang bisa membahayakan kepentingan AS. Kedua, terkait dengan keamanan aliansi dan stabilitas regional. Kehadiran AS di Laut China Selatan merupakan penjamin keamanan regional bagi

aliansi AS. Kegagalan komitmen AS terhadap aliansinya dapat merusak kepentingannya di wilayah Asia-Pasifik. Ketiga, kepentingan AS dalam ekonomi. Setiap tahunnya, \$5,3 triliun perdagangan melewati Laut China Selatan. AS menyumbang \$1,2 triliun dari totalnya, sehingga konflik dalam skala apapun dapat membahayakan ekonomi regional dan AS. Keempat, AS memiliki kepentingan untuk tetap menjaga stabilitasnya dengan China dan mengamankan masalah regional dan global⁹.

Ketegangan ini memanaskan kembali ketika AS dengan seenaknya mengirim kapal dan pesawat militer canggih ke Laut China Selatan. Pada 12 Juli 2021, tanpa izin dari pemerintah China, kapal perusak dengan rudal berpemandu AS USS Benfold secara ilegal masuk tanpa izin ke perairan teritorial China. Dai Bing, kuasa usaha misi permanen China untuk PBB saat debat terbuka dewan keamanan tentang keamanan maritim tanggal 9 Agustus 2021 berpendapat “mereka tidak bergabung dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut, tetapi menganggap dirinya sebagai hakim Konvensi, menuding negara lain dan mencampuri secara sewenang-wenang. Mereka tidak memiliki kredibilitas dalam masalah maritim”. Bing mengatakan bahwa saat ini China dan para anggota ASEAN sedang bersama-sama menjaga stabilitas umum di Laut China Selatan dan memastikan semuanya menikmati kebebasan navigasi dan penerbangan sesuai dengan hukum internasional.

Sementara pihak Angkatan Laut AS memberikan pernyataan “Di bawah hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut, semua kapal negara termasuk kapal perang mereka berhak menikmati kebebasan melintasi secara damai di laut teritorial. Dengan melintasi perairan secara damai tanpa memberikan pemberitahuan atau meminta izin, AS menentang pembatasan atau larangan berlayar yang diberlakukan oleh China, Taiwan, dan Vietnam di perairan bebas ini”. Masuknya kapal perang AS di wilayah Laut China Selatan ini bertepatan dengan hari

⁸ Peter Dutton, 2011, “Three Disputes and Three Objectives—China and the South China Sea”, *Naval War College Review*, 64(4). hlm. 55-58.

⁹ Bonnie S Glaser, 2012, “Contingency Planning Memorandum No. 14: Armed Clash in the South China Sea”, Council on Foreign Relations.

peringatan lima tahun kemenangan Filipina atas gugatannya soal klaim wilayah di perairan Laut China Selatan. Tindakan ini juga mempertegas bahwa AS tidak menyetujui kawasan Laut China Selatan dan Kepulauan Paracel sebagai kepemilikan China dan klaim China atas perairan tersebut tidak sesuai hukum internasional.

Jika dilihat dari pernyataan Angkatan Laut AS, sebenarnya mereka menginginkan adanya kebebasan berlayar di laut Internasional dan menganggap tindakan yang dilakukan China, Taiwan, dan Vietnam ini melanggar kebebasan berlayar di perairan bebas. Jika dilihat dari sisi positifnya, AS membantu menyuarakan pendapat negara-negara yang juga tidak setuju pada kebijakan baru yang dibuat oleh China. Namun melihat dari sisi negatif, ditakutkan dibalik ikut campurnya AS pada wilayah Asia Tenggara adalah untuk mengontrol perekonomian di wilayah tersebut agar tidak ada negara di Asia yang mendominasi ekonomi bidang kelautan karna jika dilihat potensi kelautan yang dimiliki perairan Asia ini sangat besar.

3.2. Indonesia Dalam Pusaran Konflik Laut China Selatan

Berbicara mengenai *rebalancing* Amerika Serikat dan kebangkitan kekuatan China di wilayah Asia Pasifik, *security dilemma* akan tepat digunakan untuk menggambarkan kekhawatiran negara lain di Asia Tenggara yang berdekatan dengan kawasan Laut China Selatan. Beberapa negara memperkuat militernya dan mulai membuat aliansi dengan negara lain. Tindakan defensif yang diambil oleh negara-negara di Asia Tenggara dikarenakan sengketa yang terjadi di Laut China Selatan bersifat mengancam. Selain itu, Amerika Serikat dan China merupakan negara hegemoni terbesar dalam bidang ekonomi. Kedua negara tersebut termasuk negara *super power* jika dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara. Laut China Selatan menjadi bukti arena pertarungan antara AS dan China dalam memperebutkan kekuasaannya.

Sebenarnya Indonesia bukanlah negara yang bersengketa di wilayah Laut China Selatan, akan tetapi dihadapkan pada

permainan besar dan tantangan dalam mempertahankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan Laut China Selatan¹⁰. Konflik yang terjadi di Laut China Selatan sudah tidak bisa terhindarkan lagi, Indonesia yang memiliki wilayah perbatasan laut dengan Laut China Selatan terpaksa mengikuti pusaran konflik tersebut dan mengharuskan Indonesia mempertahankan kedaulatan NKRI atas invasi asing karena diperkirakan akan ada beberapa ancaman, antara lain:

- Agresifitas serangan nelayan asing
- Penguasaan wilayah sengketa
- Pembangunan pulau buatan

Agresifitas tindakan nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia bukanlah tanpa alasan. Tindakan illegal atau bisa disebut serangan yang dilakukan oleh nelayan asing tersebut dapat diartikan sebagai bentuk ancaman perang hibrida yang berkembang di kawasan Laut China Selatan. Ancaman perang hibrida dengan strategi agresifitas nelayan asing ini perlu dijadikan perhatian khusus negara mengingat mereka bisa keluar masuk perbatasan perairan dengan leluasa. Kebijakan pemerintah dalam hal pemberantasan pelanggaran nelayan asing perlu diperjelas dan dipertegas. Pelemahan terhadap hukuman yang membuat jera pelanggar nelayan tersebut dapat juga diartikan sebagai pelemahan pertahanan laut Indonesia¹¹. Seperti eksekusi hukuman penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP). Hukuman ini dinilai efektif karena mampu mengurangi angka pelanggaran *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Indonesia¹². Namun, kebijakan ini sudah dihentikan sejalan dengan

¹⁰ Khanisa, "Pembangunan Maritim Indonesia" dalam Khanisa dan Faudzan Farhana, *Keamanan Maritim ASEAN Dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2018), hlm. 8.

¹¹ Gideon A, "Menteri Susi Kembali Tenggelamkan 13 Kapal Asing Pencuri Ikan", 12 Mei 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3963901/menteri-susi-kembali-tenggelamkan-13-kapal-asing-pencuri-ikan> diakses pada 27 November 2021.

¹² Ilma N, "Peri Laut: Kembalikan Kejayaan Laut Nusantara," dalam Umi N, Ilma N, Raja HP, dan Febrina P (eds), *Mina Bahari: Illegal Fishing No More...! Komitmen Serius Pemerintah Perangi Illegal Fishing*, (Jakarta: Pusdatin Sekjen KKP, 2015), hlm. 62-66.

pergantian kabinet pemerintahan Indonesia. Selain itu, pembangunan pangkalan TNI di wilayah Natuna yang telah diresmikan pada 18 Desember 2019 dapat berfungsi sebagai *deterrence effect* atau pencegahan tindak-tanduk pelanggaran yang mungkin terjadi. Penambahan kekuatan militer untuk ketahanan nasional di wilayah perairan Natuna juga memberikan dampak positif, yaitu tindakan ilegal atau agresifitas serangan yang dilakukan oleh nelayan asing berkurang.

Persengketaan wilayah di kawasan Laut China Selatan masih terus berlangsung. Manuver yang dilakukan negara pihak sangat agresif dan intensif. Mulai dari melakukan kegiatan eksplorasi, seperti pengeboran minyak serta gas dan aksi-aksi klaim lainnya untuk mempertegas wilayah kedaulatan mereka. Hal tersebut juga dilakukan oleh Indonesia, yaitu mengelola sumber daya alam yang ada di Natuna. Indonesia mempercayakan pembangunan dan pengeksplorasi SDA di Natuna kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta¹³. Upaya negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan dan Indonesia menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak untuk melakukan pengelolaan SDA di wilayahnya. Menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, negara pantai berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk melakukan pengelolaan SDA¹⁴. Upaya-Upaya pengelolaan sumber daya nasional baik alam ataupun lainnya yang dilakukan di wilayah kedaulatan dapat dijadikan sebagai strategi *settlement* atau pendudukan atas hak penuh wilayahnya sendiri sehingga ada bukti nyata pengelolaan wilayah yang dilakukan oleh negara sebagai pemilik.

Upaya perebutan wilayah dan saling klaim kedaulatan sudah membentuk sebuah perang hibrida yang begitu kompleks. Tidak

hanya itu, pembangunan kekuatan pertahanan militer sebagai upaya *deterrence effect* atau pencegahan adalah ranah strategis¹⁵. Pembangunan kekuatan pertahanan militer di wilayah tersebut selain untuk menunjukkan keberadaan negara, menegaskan wilayah kedaulatan dan klaim atas suatu wilayah, melainkan juga untuk meningkatkan kekuatan pertahanan lebih dari negara lain yang sedang bersitegang. China yang dalam kurun waktu 2012 hingga 2018 telah berhasil membangun pulau buatan dan difungsikan sebagai pangkalan militer.

Permasalahan utama dari kegiatan membangun pulau tersebut adalah pembangunan pulau buatan ini berada dalam kawasan yang berstatus quo atau belum ditetapkannya batas wilayah. Selain melanggar hukum internasional, juga dapat mengeskalasi ketegangan. Terdapat beberapa alasan yang mampu menjelaskan kepentingan China dalam membangun pulau buatan tersebut. Pertama, pengakuan kedaulatan atas wilayah di Laut China Selatan. *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* telah mengamati dan mendokumentasikan seluruh aktifitas China di Laut China Selatan. Pengamatan ini mulai dari persengketaan perebutan pulau hingga pembangunannya. CSIS melihat bahwa tujuan pembangunan pulau buatan tersebut adalah salah satu upaya China untuk mendeklarasikan kedaulatan¹⁶.

3.3. Strategi *Balance Of Power* Indonesia dalam konflik Laut China Selatan

Indonesia termasuk negara yang tidak suka penyelesaian masalah dengan konflik ataupun perang. Hal tersebut juga berlaku pada kasus sengketa di kawasan Laut China Selatan. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berpendapat dalam siaran pers yang dilansir dari laman resmi Kemhan pada bulan Juni 2021 "Dialog dan Konsultasi

¹³ Karunia A.M, "Tahun Ini Pertamina Mulai Lakukan Pengeboran Minyak di Blok East Natuna", 9 Januari 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/155624826/tahun-ini-pertamina-mulai-lakukan-pengeboran-minyak-di-blok-east-natuna?page=all> diakses pada 27 November 2021.

¹⁴ CSIS, "Signaling Sovereignty: Chinese Patrols At Contested Reef", 26 September 2019, <https://amti.csis.org/signaling-sovereignty-chinese-patrols-at-contested-reefs/> diakses pada 27 November 2021.

¹⁵ Stashwick S, "Argument: China's South China Sea Militarization Has Peaked", 19 Agustus 2019, <https://foreignpolicy.com/2019/08/19/chinas-south-china-sea-militarization-has-peaked/> diakses pada 27 November 2021.

¹⁶ CSIS, "Signaling Sovereignty: Chinese Patrols At Contested Reef", 26 September 2019, <https://amti.csis.org/signaling-sovereignty-chinese-patrols-at-contested-reefs/> diakses pada 27 November 2021.

dengan kepercayaan dan keyakinan bersama dapat menyelesaikan semua masalah di kawasan termasuk permasalahan Laut China Selatan. Dengan demikian Laut China Selatan yang dikelola dengan baik akan memperkuat kemitraan bersama yang setara, saling menguntungkan, dan sangat diperlukan untuk perdamaian dan stabilitas global.”¹⁷

Untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya, Indonesia melakukan strategi *balance of power*. Ada beberapa tindakan yang diambil Indonesia guna menyeimbangkan kekuatan dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain guna memperkuat kedaulatannya. Antara lain kerjasama ekonomi, politik dan militer. Strategi *balance of power* yang dilakukan Indonesia juga disebabkan oleh prinsip Indonesia yang cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Indonesia sangat menghindari konflik dan perang karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan.

Mengingat adanya potensi ancaman ekonomi dari China, Indonesia harus melakukan tindakan antisipasi terhadap serangan ekonomi China. Ancaman ekonomi China bukanlah hal yang baru. Ketergantungan ekonomi Indonesia sudah terlihat dari dua dekade terakhir semenjak RI menandatangani perjanjian ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) tahun 2001. Tidak hanya Indonesia, ancaman ketergantungan terhadap ekonomi China juga dirasakan oleh negara-negara anggota ASEAN¹⁸. Jika dibandingkan, kekuatan ekonomi yang dimiliki Indonesia dengan negara lain yang bersitegang di Laut China Selatan masih tergolong kuat. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Indonesia menjadi anggota negara G2070. Satu-satunya negara pihak yang dapat mempengaruhinya adalah China. Selain keanggotaannya di G20, China juga masuk dalam keanggotaan WTO.

Kekuatan ekonomi China mampu memberikan kerentanan terhadap ekonomi domestik AS. Dengan demikian, ekonomi China juga akan mampu memberikan pengaruhnya pada negara di kawasan, termasuk Indonesia¹⁹.

Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga kepentingan nasional. Demi melindungi kemerdekaan dan integritas teritorialnya, Indonesia telah berupaya untuk mengelola penyebaran kewenangan di Asia Tenggara. Strategi ini sebagai suatu “keseimbangan dinamis”, dan melalui strategi ini Indonesia akan berusaha untuk menggeser beban diplomasinya antara China dan Amerika Serikat untuk mempertahankan keseimbangan di antara kedua negara itu. Indonesia memang telah lama berupaya menghindari persepsi atau pandangan dari negara lain yang menyatakan bahwa Indonesia telah bersekutu terlalu dekat dengan Amerika Serikat ataupun China, oleh sebab itu Indonesia masih setia dengan kebijakan politiknya. Akibat dari langkah tersebut, berarti Indonesia mengambil sikap yang terlihat tidak konsisten di mata negara lain dengan kebijakan lemah Indonesia dalam isu-isu tertentu.

Melalui pandangan bahwa diplomasi sebagai upaya elitis yang terlalu mengurus konsep-konsep abstrak, Presiden Jokowi khususnya berpandangan skeptis akan manfaat *summit diplomacy* (diplomasi multilateral lewat pertemuan puncak), yang ia hubungkan dengan gaya keliling dunia Yudhoyono. Saat ia menduduki jabatan, kebijakan luar negeri menjadi kurang penting karena penekanan baru pada pengembangan ekonomi²⁰. Presiden Jokowi sepertinya lebih fokus kepada kegiatan yang menghasilkan dan bermanfaat bagi masyarakat, beliau menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk berfokus pada kegiatan diplomasi membumi, atau dapat diartikan sebagai diplomasi yang akan “berguna bagi rakyat”, dengan fokus utamanya pada

¹⁷ Bayu Hermawan, “Bertemu Menhan China, Prabowo Singgung Persoalan LCS”, 2021, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qux5q354> diakses pada 27 November 2021.

¹⁸ Latif A dan Siwage D.N, “Asean-China Free Trade Agreement: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia”, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Edisi XXVI no.1 (2010), hlm. 2-4.

¹⁹ Wing Thye Woo, “What are the legitimate worries about China’s WTO membership?,” dalam Ligang Song (ed), *Dilemmas of China’s Growth in the Twenty-First Century*, (Canberra: ANU E Press, 2012), hlm. 11-25.

²⁰ *Ibid*, hlm. 12.

kerjasama perdagangan dan investasi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Dalam bidang pertahanan, Indonesia melakukan banyak kerja sama dengan berbagai negara. Antara lain ialah pertukaran Perwira Muda ASEAN-China dan Latihan Maritim ASEAN-China adalah beberapa bidang kerja sama yang telah menghasilkan manfaat bagi langkah-langkah pembangunan kepercayaan dan peningkatan kapasitas dan kemampuan ASEAN dan China di bidang pertahanan²¹.

Masih dengan kebijakan luar negerinya, Indonesia juga berminat untuk bergabung dengan latihan perang gabungan dengan Amerika Serikat di wilayah Natuna. Tercatat dua kali latihan dilakukan bersama AS di Batam yang berjarak 480 km dari Natuna. Latihan ini termasuk penggunaan pengawasan dan pesawat patroli, seperti penggunaan pesawat P-3 Orion, yang dapat mendeteksi kapal di permukaan dan kapal selam. Menteri pertahanan mengatakan telah menghabiskan US\$14,2 juta (sekitar Rp196 miliar) untuk memperkuat pangkalan militer di Pulau Natuna²². Namun pemerintah membantah bahwa latihan gabungan yang dilakukan tersebut merupakan salah satu antisipasi terhadap meningkatnya ketegangan di Kawasan Laut Cina Selatan. Pemerintah memilih menyebutnya sebagai bentuk "diplomasi pertahanan." antar dua negara, pelatihan gabungan ini bisa juga diartikan sebagai sebuah bentuk strategi penangkalan seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya.

Selain itu Indonesia juga melakukan kerja sama dengan negara di luar sengketa Laut China Selatan yaitu Inggris dan Jepang. Melalui kerja sama dengan Inggris, Indonesia membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis frigate tipe arrowhead 140. Frigate adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Arrowhead 140 dipersenjatai

dengan rudal-rudal antipesawat, juga torpedo anti-kapal selam, yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut. Kapal ini juga punya kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut baik untuk misi antar-jemput personel maupun misi penyelamatan SAR (search and rescue)²³.

Selanjutnya Indonesia dan Jepang sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan dengan menandatangani perjanjian transfer peralatan dan teknologi pertahanan. Hal ini dilakukan di tengah sikap China yang meningkatkan pengaruhnya di perairan Laut China Selatan dan Timur serta memperluas kekuatan ekonominya. Menteri Prabowo menuturkan Indonesia mengajak pihak Jepang untuk berpartisipasi dalam modernisasi kapasitas pertahanan. "Kami juga mendorong pelatihan bersama antara layanan kami, angkatan laut dan juga darat." ucapnya dalam konferensi pers bersama di Tokyo. China yang terus mengklaim wilayahnya di Laut China Timur dan Selatan telah menjadi masalah prioritas dalam hubungan China-AS. Hal ini meningkatkan kekhawatiran keamanan yang signifikan bagi Jepang serta negara-negara ASEAN termasuk Indonesia²⁴. Selain Inggris dan Jepang, masih banyak kerja sama bidang pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan meningkatkan kemampuan militer Indonesia sebagai upaya *deterrence effect* atau pencegahan.

4. PENUTUP

Laut China Selatan telah lama menjadi arena pertarungan politik regional maupun internasional. Potensi Laut China Selatan menyebabkan adanya ketegangan dalam perselisihan kedaulatan wilayah dan yurisdiksi

²¹ Bayu Hermawan, "Bertemu Menhan China, Prabowo Singgung Tentang LCS". <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qux5q354> diakses pada 27 November 2021.

²² Hendra Maujana Saragih, Op.Cit, hlm. 13.

²³ Eva. "Prabowo Jawab Ancaman Kapal Perang China di Natuna". 2021, <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5729444/prabowo-jawab-ancaman-kapal-perang-china-di-natuna/amp> diakses pada 27 November 2021.

²⁴ Ahmad Faiz. "Indonesia-Jepang Kerja Sama Transfer Teknologi Pertahanan", 31 Maret 2021, <https://www.google.com/amp/s/dunia.tempo.co/amp/1447676/in-donesia-jepang-kerja-sama-transfer-teknologi-pertahanan> diakses pada 27 November 2021.

maritim. Terbukti dari AS yang berusaha terlibat di wilayah Laut China Selatan. *Rebalancing* antara AS dan China di Laut China Selatan membuat ketegangan di wilayah tersebut semakin tinggi. Beberapa ahli pun berpendapat persaingan atau perebutan kawasan yang terjadi saat ini kemungkinan akan menimbulkan perang atau konflik bersenjata di abad 21. Jika terjadi konflik antara AS dan China pada kawasan Laut China Selatan, tentunya akan berimplikasi langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia. Untuk menghadapi skenario tersebut, Indonesia harus mempersiapkan kekuatan pertahanannya. Untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya, Indonesia melakukan strategi *balance of power*. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain guna memperkuat kedaulatannya. Antara lain kerjasama ekonomi, politik dan militer.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Widodo dan Bapak Yusnaldi selaku dosen di Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang telah membantu saya dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Gideon. Menteri Susi Kembali Tenggelamkan 13 Kapal Asing Pencuri Ikan, 12 Mei 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3963901/menteri-susi-kembali-tenggelamkan-13-kapal-asing-pencuri-ikan>. Diakses pada 27 November 2021.
- A, Latif dan Siwage D.N. 2010. "Asean-China Free Trade Agreement: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia", Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Edisi XXVI no.1.
- Claritha Cendrawati Warembai. 2014. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Masalah Nuklir Korea Utara. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada).
- CSIS. Signaling Sovereignty: Chinese Patrols At Contested Reef". 26 September 2019. [https://amti.csis.org/signaling-sovereignty-chinese-patrols-at-](https://amti.csis.org/signaling-sovereignty-chinese-patrols-at-contested-reefs/)

- [contested-reefs/](https://amti.csis.org/signaling-sovereignty-chinese-patrols-at-contested-reefs/). Diakses pada 27 November 2021.
- Dutton, Peter. 2011. "Three Disputes and Three Objectives—China and the South China Sea", *Naval War College Review*, 64(4).
- Eva. "Prabowo Jawab Ancaman Kapal Perang China di Natuna". 2021. <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5729444/prabowo-jawab-ancaman-kapal-perang-china-di-natuna/amp>. Diakses pada 27 November 2021.
- Faiz, Ahmad. Indonesia-Jepang Kerja Sama Transfer Teknologi Pertahanan. 31 Maret 2021. <https://www.google.com/amp/s/dunia.tempo.co/amp/1447676/indonesia-jepang-kerja-sama-transfer-teknologi-pertahanan>. Diakses pada 27 November 2021.
- Glaser, Bonnie S. 2012. "Contingency Planning Memorandum No. 14: Armed Clash in the South China Sea", Council on Foreign Relations.
- Hermawan, Bayu. Bertemu Menhan China, Prabowo Singgung Tentang LCS. 2021. <https://www.google.com/amp/s/m.r epublika.co.id/amp/qusx5q354>. Diakses pada 27 November 2021.
- Khanisa. 2018. "Pembangunan Maritim Indonesia" dalam Khanisa dan Faudzan Farhana, Keamanan Maritim ASEAN Dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia. (Jakarta: LIPI Press).
- M, Karunia A. Tahun Ini Pertamina Mulai Lakukan Pengeboran Minyak di Blok East Natuna. 9 Januari 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/155624826/tahun-ini-pertamina-mulai-lakukan-engeboran-minyak-di-blok-east-natuna?page=all>. Diakses pada 27 November 2021.
- N, Ilma. 2015. Peri Laut: Kembalikan Kejayaan Laut Nusantara," dalam Umi N, Ilma N, Raja HP, dan Febrina P (eds), *Mina Bahari: Illegal Fishing No More...!* Komitmen Serius Pemerintah Perangi Illegal Fishing. (Jakarta: Pusdatin Sekjen KKP).

- Roza, Rizki. 2013. Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- S, Stashwick. Argument: China's South China Sea Militarization Has Peaked. 19 Agustus 2019. <https://foreignpolicy.com/2019/08/19/china-south-china-sea-militarization-has-peaked/>. Diakses pada 27 November 2021.
- Saragih, Hendra Maujana. 2018. Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan. Jakarta: Universitas Nasional.
- SIPRI. Recent Trends in Military Expenditure. 2015. http://www.sipri.org/research/armaments/milex/research/armaments/milex_research/armaments/milex/milex_database. Diakses tanggal 21 November 2021.
- Woo, Wing Thye. 2012. "What are the legitimate worries about China's WTO membership?," dalam Ligang Song (ed), Dilemmas of China's Growth in the Twenty-First Century. (Canberra: ANU E Press).